

This article is focused on the role of religious elite in 'the mullah' country in order to play and make a great change (from absolute monarchy to theodemocracy) in Iran, that is a movement of Islamic Iran Revolution in Feb 11st 1979. This revolution has a great impact either in the Middle East regions or in the world. Why not? An old ulama could move a revolution having uncrowned Pahlevi Dynasty which have a strongest armed forces and supported by a super power country, the United State of America. After the ruin of the Iran Shah, Ayatullah Khomeini offered an ideology to his followers, that is 'theodemocracy', in which there is a close relationship between religion and state (dīn wa dawlah). The form of governmental system they professed was Islamic Republic of Iran. A monumental thought of Khomeini was wilāyat al-faqīh, an advanced elaboration of the concept of Imāmah which is to be a credo of Imāmīah Shiites. According to Khomeini, fuqaha¹ have an authority to ruler. Therefore, if the ruler is a devoted Moslem, he is subjected to obey fuqaha². Although there are ripples of conflict in the government of Islamic Republic of Iran on the system of wilāyat al-faqīh, nevertheless Ayatullah Khomeini's charisma, as a matter of fact, could muffle them, so that when one speaks about Iran's contemporary region, he/she could not be separated from the figure of Khomeini and Syi'ite doctrines.

Keyword : *Elit, Mullah dan Wilayatul Faqih.*

129

PERANAN ELIT ULAMA DI NEGERI PARA MULLAH (Studi Pemikiran Khomeini tentang Wilayatul Faqih)

Sulaiman Kurdi¹

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Amien Rais,² pada abad ke-20 paling tidak ada tiga revolusi besar yang mempunyai dampak luas melampaui batas-batas

¹ Penulis adalah dosen IAIN Antasari Banjarmasin sedang menyelesaikan kuliah di Pascasarjana UIN Yogyakarta dengan konsentrasi Politik Islam

² M. Amien Rais, "Kata Pengantar", hlm. 11, dalam M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989).

wilayah tempat asal revolusi-revolusi tersebut. *Pertama*, revolusi Rusia 1917 yang merupakan revolusi sosialis pimpinan Vladimir Illich Lenin. *Kedua* adalah revolusi Mao Zedong pada 1949 di daratan Cina, melalui long march yang cukup menakjubkan. Wajah Asia pada pasca Perang Dunia II mengalami perubahan yang sangat besar akibat keberhasilan Mao mentransformasikan Cina menjadi negara sosialis Marxis di Asia. *Revolusi ketiga* yang mengguncangkan sendi-sendi hubungan internasional di kawasan Timur Tengah dan berdampak internasional adalah revolusi Islam Iran Pimpinan Ayatullah Khomeini yang pecah pada 1979. Revolusi Iran itu berhasil membebaskan rakyat Iran dari belenggu Amerika, setelah negara adidaya cukup lama memegang kendali Syah sehingga Iran tidak punya kedaulatan dalam arti kata sebenarnya.

Suatu revolusi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Namun, revolusi itu sendiri merupakan sebuah proses panjang yang disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah semakin lebarnya jurang antara harapan dan kenyataan, antara si kaya dan si miskin, terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi di bidang politik serta terakumulasinya ketidakpuasan dikalangan rakyat. Revolusi Islam juga merupakan akibat dari terakumulasinya ketidakpuasan mayoritas rakyat Iran terhadap berbagai kebijakan rezim Syah Reza Pahlevi.³ Sebelum berubah menjadi suatu pergolakan panjang yang meruntuhkan kekuasaan Syah, bermunculan gerakan-gerakan baik dari kelompok ulama, intelektual ataupun para pedagang (*bazaar*) beserta rakyat yang tidak puas atas kebijakan Syah dalam memerintah Iran dan mereka ingin menjungkir-balikkan pemerintahan tersebut.

Ketidakpuasan tersebut menimbulkan revolusi, yang digerakkan oleh kelompok-kelompok paling berpengaruh dalam perumusan filsafat pergerakan Revolusi Islam Iran, secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua; *pertama*, elit ulama (*religious scholars*) pada satu pihak

³ M. Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 61

dan elit intelektual (*intelektualis*) di pihak lain. Di antara yang paling menonjol di dalam elit-elit “ulama” termasuk di antaranya, Ayatullah Syaikh Murtadha Mutahhari, dan tentu saja, Ayatullah Ruhullah Khomeini. Sedangkan yang paling menonjol dalam elit intelektual adalah Ali Syariati, Mehdi Bazargan dan Bani Sadr.⁴

Meskipun kedua elit pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni menumbangkan rezim otokritik Syah Reza Pahlevi, namun terdapat perbedaan-perbedaan pokok, baik dalam kerangka ideologi perlawanan mereka masing-masing terhadap Syah Iran, maupun dalam cara dan metode bagaimana perlawanan itu bisa diwujudkan, memang jika dilihat dari segi perlawanan terhadap Syah, elit “ulama” seharusnya menjadi sekutu setia elit intelektual. Tetapi tidak jarang terjadi justru sebaliknya, kedua elit ini acapkali tidak hanya berada dalam hubungan yang tidak terlalu serasi, tapi bahkan konflik.

Elit “ulama” Iran, berangkat dari ideologi keagamaan tradisional Syiah⁵ di mana perlawanan terhadap rezim penguasa merupakan bagian integral dari teologi kedatangan kembali sang Imam yang Ghaib. Meski terjadi sejumlah pembaharuan teologis di kalangan “ulama”, tapi bisa dikatakan mereka pada hakikatnya tidak bergeser banyak dari prinsip dasar ini. Pada pihak lain, elit intelektual, meski pada dasarnya juga berangkat dari teologi Syiah dalam melancarkan kritik tajam terhadap penguasa, tetapi pemikiran barat cukup dominan dalam perjuangan mereka. Karena itu mereka sering dituduh bersikap “kebarat-baratan” (Westernized). Elit intelektual (karena sifat dasar kritisisme mereka) tidak jarang pula mengkritik “ulama” dan institusi-institusi tradisional yang berada di bawah kekuasaan mereka. Tetapi, elit intelektual dengan latar belakang pendidikan barat dan kritisme terhadap doktrin dan lembaga-lembaga keagamaan mereka, dalam pandangan kalangan

⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 67.

⁵ Aliran-aliran Syiah lebih lanjut lihat, Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1978), juga dalam Ali Zainal Abidin, *Identitas Mazhab Syiah: Melacak Akar Historis Kelahiran dan Dasar-Dasar Ajarannya*, (Jakarta: Ilya, 2004).

tertentu dalam masyarakat, tidak sepenuhnya cocok untuk menjadi pejuang kepentingan agama.⁶ Dalam perjalanan sejarah Iran pun munculnya tarik menarik dari dua kelompok (para mullah dan nasionalis) tersebut, tidak terkecuali juga dalam tubuh ulama (seperti dalam mullah sendiri ada kelompok garis keras dan reformis) hingga saat ini.

Sampai sekarang pengaruh revolusi Iran 1979⁷ masih tetap menarik untuk dikaji. Banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar untuk menjelaskan fenomena dan pengaruh dari revolusi tersebut dengan tinjauan sosiologis, antropologis, ekonomis, politik, psikologi, teologi dan lainnya. masing-masing pakar menguraikan berbagai dimensinya, dampak regional dan dampak internasional.

Tulisan ini menguraikan peranan elit ulama dalam membangkitkan semangat untuk menumbangkan Syah Reza Pahlevi, bagaimana peranan Ayatullah Khomeini dalam gerakan Revolusi Iran? Juga bagaimana pemikiran Khomeini dengan *Wilayatul Faqihnya* dalam sistem pemerintahan di Iran?

B. Kerangka Konseptual

Istilah elit berasal dari bahasa Inggris “elite” yang juga berasal dari bahasa latin “eligere”, yang berarti memilih. Istilah elit digunakan pada abad ke tujuh belas untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti kesatuan militer atau kalangan bangsawan.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 67 – 68.

⁷ Pada tanggal 23 Desember 2006, diselenggarakan “Seminar Nasional Akhir Tahun: Iran, Islam dan Barat” oleh Rausyah Fikr Yogyakarta bertempat di UC UGM Yogyakarta. Dalam seminar itu menurut penulis, revolusi Islam Iran mempunyai pengaruh yang cukup besar dan fenomenal sampai sekarang ini dan menjadikan revolusi itu sebagai tonggak kebangkitan umat Islam di dunia. Revolusi ini pula dikhawatirkan oleh negara-negara Barat munculnya “Islam Politik”.

⁸ Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Teraswang, 2000), hlm. 21.

Dalam konteks Ilmu Politik, teori elit muncul dari pemikiran Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto Michels dan Jose Ortega Y. Gasset, Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik, merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari pengacara, ulama, kyai, advokat, intelektual, bisnisman bahkan preman. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang kaya dan pandai (berilmu), yang mempunyai kelebihan dalam ilmu pengetahuan ataupun moral dan sebagainya. Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas; (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit.⁹

Secara umum, baik Pareto, Mosca, Michels maupun Ortega sepakat setiap masyarakat ada kelompok terkecil "elit" yaitu mereka adalah orang-orang yang terbaik, berbakat, berpengaruh, ataupun yang mempunyai kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dalam melihat peran yang dimainkan "para mullah"¹⁰ di negeri Iran yang bisa menghancurkan dominasi Syah Reza Pahlevi yang ditopang oleh Amerika Serikat dan menggantikannya dengan ideologi Islam yang bercorak Syiah. Kekuatan

⁹ SP. Norma, *Teori Politik Modern*, terj. Yohanes Kristiarto (dkk), (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 199 - 200.

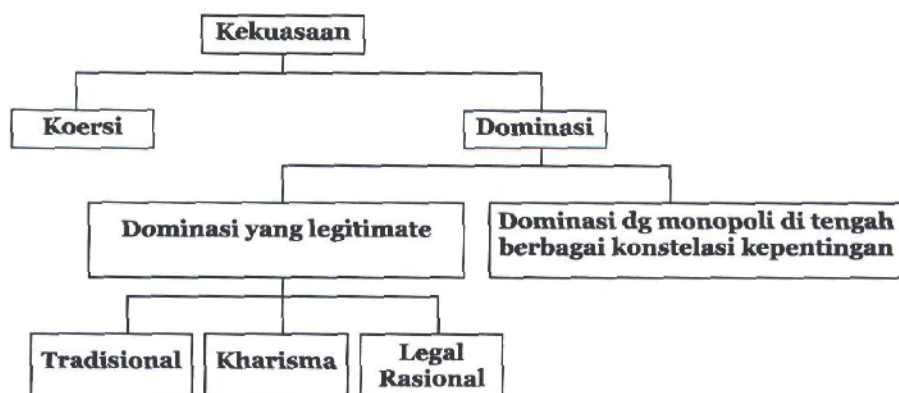
¹⁰ *Mullah*; adalah istilah populer bagi kaum rohaniawan Islam Iran, (semacam santri di Indonesia). Dengan kata lain, *mullah* adalah ulama yang memperoleh pendidikan akidah dan fikih secara tradisional. Secara etimologi, *mullah* berasal dari bahasa Arab *mawla* dengan berbagai arti, antara lain "pelindung, tuan, atau yang memberi nikmat", dalam bahasa Turki disebut *molla*, dan dalam bahasa Persia dan Hindi disebut *mulla*. Lebih lanjut lihat Umar Shahab, *Mullah*, hlm. 101-102, Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

dan kekuasaan yang dilakukan oleh “para mullah” ini bisa dilihat dari pemikiran Weber tentang dominasi “elite”¹¹ ulama Iran, (lihat tabel).

Konsep Dominasi

Bentuk Dominasi	Sumber	Kepemimpinan	Perubahan
Tradisional	Non-rasional	Kebiasaan	Statis
Kharismatik	Pengaruh (emosional)	Pribadi/perorangan	Dinamis
Rasional	Rasional	Kekuasaan impersonal	Dinamis

Di lain hal, Max Weber berbicara tentang kekuasaan dan dominasi yaitu:¹²



Dalam kajian teori “elit” politik, seperti para mullah, mereka sangat dihormati karena *keulamaan* dan *keilmuan* yang mereka miliki sehingga menjadikan mereka sebagai orang yang kharismatik di negeri Iran.

¹¹ Mark Evans, “Elitism”, hlm. 233 dalam David Marsh dan Gerry Sloker (ed), *Theory and Methods in Political Science*.

¹² Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 21.

Mereka juga mengubah dari sistem monarki absolut menjadi Republik Islam Iran. Perbedaan yang mencolok di antara keduanya adalah, jika sebelum revolusi, Iran merupakan negara sekuler, maka pasca-revolusi Iran bisa disebut sebagai sebuah negara “teo-demokratis” yang didominasi kaum mullah (ulama Syiah).

C. Selayang Pandang Tentang Negeri Para Mullah

Iran adalah sebuah negara republik teokratis dan pusat Islam Syiah. Dulu Iran lebih dikenal dengan nama Persia. Pada abad ke-7, bangsa Arab masuk ke Iran dan memperkenalkan Islam. Di masa Dinasti Safawi (1502–1736), Islam Iran menjadi Islam Syiah hingga kini. Pada tahun 1979, terjadi Revolusi Islam Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini (1900–1989) yang menggulingkan Syah Reza Pahlevi (1919–1980).

Republik Islam Iran dengan ibukota Teheran merupakan sebuah negara yang bergunung-gunung di kawan Timur Tengah, terletak di antara 25° dan 40° LU serta 44° dan 83°BT. Di sebelah Utara, Iran berbatasan dengan Republik Armenia, Laut Kaspia dan Republik Turkmenistan, di barat daya dengan Irak, di Timur laut dengan Afghanistan dan Pakistan, di barat laut dengan Turki, dan di selatan dengan Oman serta Teluk Persia. Luas wilayah Iran 1.648.000 km², terbagi atas 28 propinsi, 195 kota praja, dan 500 distrik, propinsi terbesar adalah Khurasan dengan luas 315.687 km², sedangkan propinsi terkecil adalah Gilan dengan luas 14.820 km². berdasarkan data terakhir, penduduk Iran berjumlah 69.018.924 jiwa; pemeluk Islam Syiah 89%, Islam Sunni 10% dan lain-lain 1%.¹³

Dulu Iran dikenal dengan sebutan Persia, ketika Ayatullah Khomeini dapat menumbangkan Syah Reza Pahlevi sebutan Persia diganti dengan Iran, suatu nama yang pernah dipakai nenek moyang bangsa

¹³ Umar Shihab, *Iran (Zomhuri - Ye Islami - ye Iran)*, hlm. 212, oleh Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

Iran. Dan Dataran Tinggi Iran yang mereka kuasai pada sekitar tahun 1700 SM. Disebutkan pula bahwa pada masa kekuasaan Darius (550 – 486 SM; salah seorang maharaja Iran tempo dulu), kota “Iran” juga pernah digunakan bagi negeri kekuasaannya.

Diperkirakan, sebelum 5000 SM malah terdapat bangsa yang menetap di Iran, namun tidak diketahui dari mana mereka berasal, akan tetapi sekitar tahun 2000 SM bangsa Arya yang juga merupakan ras Indo Eropa itu telah mulai menetap di Iran, yakni di wilayah selatan. Mereka berasal dari suku Fars. Kemudian pada 1000 SM datang pula suku media yang juga berasal dari bangsa Arya dan menetap di wilayah utara Iran. Pada 700 SM suku Media berhasil menguasai wilayah yang luas—termasuk suku Fars—kemudian mendirikan kerajaan dengan Ecbatana sebagai ibukotanya. Namun 553 SM kerajaan tersebut dikalahkan oleh Cyrus Agung (pendiri dinasti Akhemenida). Dan ia mendirikan kerajaan yang besar dan mencapai puncaknya pada masa Darius I. dinasti Akhemenida dapat dikalahkan oleh Alexander Agung (356 – 323 SM). Setelah itu imperium Persia berturut-turut dikuasai oleh Dinasti Selenkida, Parthia, dan Sasaniyah (226 – 641).¹⁴

136

Pada tahun 637 melalui perang Qadiriyyah, imperium Persia jatuh ke tangan kaum muslim yang waktu itu dipimpin oleh khalifah Umar bin Khathab (634 – 644), tahun 641, seluruh imperium Persia yang waktu itu dipimpin oleh Raja Yazdajird jatuh ke tangan kaum muslim. Sejak itu Persia yang semula menganut ajaran agama Zoroaster beralih beragama Islam, akhirnya kebudayaan Islam pun berkembang di sana.

Tahun 820 Persia di bawah khalifah Baghdad. Pada tahun itu pula bermunculan dinasti kecil seperti Dinasti Samaniyah (892 – 999), Dinasti Ghaznawiyah (999 – 1037), dan Dinasti Saljuk (1037 – 1157) dan Dinasti Tahiriyah (820 – 872).

Pada tahun 1501, setelah sekitar 3 abad dikuasai oleh bangsa Mongol, muncul sebuah dinasti baru, yaitu Dinasti Safawi yang didirikan oleh Syekh Safiuddin Ardabeli (1252 – 1334), kerajaan ini menganut

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

ajaran Syiah Dua Belas Imam sebagai agama resmi negara, juga ada Dinasti Zaud 91759 – 1794), Qajar (1794 – 1925), dan Pahlevi (1925 – 1979). Sejak 11 Februari 1979, melalui revolusi Islam yang dipimpin oleh ulama terkemuka Iran, almarhum Ayatullah Khomeini (1320 H – 1900 M – 1409 H/1989M). Sistem kerajaan yang telah berkuasa ribuan tahun lalu di Iran dihapus. Kemudian berdirilah Republik Islam Iran hingga sekarang.¹⁵

Sistem Republik Islam yang diterapkan di Iran dewasa ini berlandaskan konsep *Wilayah al-Faqih*, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan seorang ulama yang takwa, adil, mampu memimpin serta disetujui mayoritas umat. Pemegang kekuasaan ini disebut *Wali al-Faqih* atau *rahbas* (Persia = pemimpin). *Wali al-faqih* pertama adalah almarhum Ayatullah Khomeini (1979 – 1989). Selanjutnya dijabat oleh Ayatullah Ali Khomeini. Akan tetapi, seorang *Wali al-Faqih* tidak duduk dalam jajaran dewan eksekutif, melainkan lebih bersifat sebagai pembimbing atau pengontrol. Untuk jajaran eksekutif, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden terpilih pertama Iran adalah Abol Hasan Bani Sadr, akan tetapi, karena dianggap telah mengkhianati nilai dan revolusi Islam, Abol Hassan akhirnya dipecat. Kemudian ia mengungsi ke Perancis. Presiden selanjutnya adalah Ali Khomeini (1981 – 1989), lalu Hasyemi Rafsanjani (1989 – 1997), dan Ali Mohammad Khatami–Arkadani (1997–2005). Kemudian melalui pemilu pada 2005 terpilih seorang tokoh konservatif sebagai presiden Iran, yaitu Mahmoud Ahmadinejad.¹⁶

D. Gerakan Revolusi Islam Iran

Revolusi Iran disebut-sebut sebagai “salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia”. Bagi banyak kalangan,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁶ *Ibid.* Lihat pula sepak terjang murid Khomeini yaitu Mahmoud Ahmadinejad dalam melakukan perlawanan terhadap Barat seperti yang terungkap dalam Eko Prasetyo, *Inilah Presiden Radikal*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm.. 115-122.

revolusi Islam Iran pada 1978 – 1979 merupakan contoh murni Islam politis, “fundamentalisme Islam”. Revolusi itu mengangkat banyak isu yang terkait dengan kebangkitan Islam kontemporer; keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik, penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, dan keadilan sosial disertai pula dengan penolakan terhadap pembaratan, otoriterisme pemerintah, dan pembagian kekayaan yang tidak merata. Iran dibawah Khomeini menjadi paradigma bagi Islam revolusioner atau radikal, dan potensi penyebaran dan ancamannya dikhawatirkan oleh banyak pemerintah di dunia muslim dan barat.¹⁷

Identitas Iran dalam hal keyakinan adalah ajaran Syiah yang merupakan sumber legitimasi politik abad ke enam belas ketika dinyatakan sebagai agama negara Iran. Islam Syiah telah terlibat dalam percaturan politik sejak kemunculannya dan karena itu memiliki sejarah dan sistem kepercayaan yang dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan dalam krisis politik. Dalam sejarah Iran, ajaran Syiah Dua Belas (*Istna Asyariyah*) sering dianggap apolitis karena menemukan akomodasi yang cukup baik dengan negara, namun, dalam masa-masa kritis sepanjang sejarah, kepercayaan, kepemimpinan, dan pranata-pranata Syiah telah memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan masyarakat Iran. Ajaran Syiah telah ditafsirkan dan dimanfaatkan untuk menjaga identitas dan kemerdekaan nasional serta menggerakkan dukungan rakyat. Pada abad ke-19 dan 20, para “elit” ulama, yang menganggap diri mereka

¹⁷ John L. Esposito & John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, terj.: Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 66. munculnya revolusi Islam Iran sangat menakutkan bagi tetangga-tetangga wilayah Iran. Salah satunya adalah negeri Irak yang dipimpin Saddam Hussein (kala itu), sebab saat ini, penduduk Irak mencapai 26 juta jiwa (tahun 2004) dengan komposisi mayoritas berbangsa Arab (75 – 85%), minoritas Kurdi (15 – 20%), Turki, Parsi dan sebagian kecil Armenia (5%). Dari segi agama, Islam Syiah (60 – 65%), Islam Sunni (32 – 37%), dan 3% agama minoritas lain seperti Nasrani. Secara geografis suku Kurdi tinggal di Irak Utara, kaum Sunni di Irak Tengah, dan Syiah tinggal di Irak Selatan, apalagi pasca jatuhnya Saddam Hussein, tarik menarik antara Sunni – Syiah dalam “kekuasaan” di Irak sangat jelas terlihat. Lebih lanjut lihat siti Muti'ah Setiawati (dkk), *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika: Dampak Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia*, (Yogyakarta: PPMTT HI Fisipol UGM, 2004).

sebagai pelindung bangsa vis-a-vis pemerintah, terlibat aktif dalam gerakan-gerakan protes rakyat. Mereka menentang pemerintah yang "lalim dan tunduk pada imperialis asing". Dalam *Protes Tembakau*¹⁸ pada 1891 – 1892, para ulama secara efektif memimpin gerakan oposisi dalam aksi embargo tembakau yang menjangkau seluruh negeri. Sedangkan dalam *Konsensi Renter* pada 1872—ketika Syah memberikan hak monopoli pembangunan jalan kereta api, perbankan dan pertambangan kepada seorang warga negara Inggris—perlawanan yang dilakukan pada 1891–1892 memaksa Syah mencabut kembali penjualan konsesi monopolinya atas tembakau kepada suatu perusahaan Inggris.¹⁹

Ketika terjadi *Revolusi Konstitusi*²⁰ pada 1905 – 1911, para "elit" ulama kembali bergabung dengan kaum *Bazaari* (pedagang dan pekerja) serta Pembaru modern (intelektual dan nasioanalis sekuler) untuk menuntut pembaharuan nasional guna membatasi kekuasaan mutlak kerajaan. Namun, meskipun kekuatan ini membangkitkan gerakan nasionalis awal dan perlawanan terhadap tekanan pihak asing, Iran, seperti kebanyakan negara muslim yang lain, tetap mengalami pengaruh imperialisme Eropa.

Warisan dan dampak kehadiran dan pengaruh asing di Iran menciptakan krisis kekuasaan, krisis keabsahan, dan krisis partisipasi yang saling berkaitan, yang semakin parah semasa pemerintahan Pahlevi. Hal itu juga menjadi preseden kuat bagi penafsiran ulang ajaran Islam Syiah guna menciptakan suatu ideologi protes dan oposisi, dan bagi para ulama, yang dalam sejarah bersikap apolitis dan politis sekaligus, untuk menegaskan peranan mereka sebagai pelindung Islam dan umat/bangsa Syiah vis-a-vis kekuasaan mutlak dan kelaliman pemerintah/negara.²¹

¹⁸ Lihat pidato Duta Besar RII, *Pikiran dan Pandangan Politik Imam Khomeini* dalam *Semianr Nasional* akhir Tahun; *Iran, Islam dan Barat* di UC UGM Yogyakarta, 23 Desember 2006, hlm. 9.

¹⁹ John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi.....*, hlm. 68.

²⁰ Lihat pidato Duta Besar RII, *Pikiran.....*, hlm. 10.

²¹ John. L. Espasito & John O. Voll, *Demokrasi.....*, hlm. 69. (Lihat lampiran 1 dan 2).

Dari uraian diatas, pergolakan yang terjadi di negari para mullah itu mencapai puncaknya pada Dinasti Pahlevi yang berpaham monarki-absolut dan digantikannya dengan ideologi "teodemokratis" banyak faktor yang melatar belakangi jatunya Syah Iran tersebut, baik dari sisi ekonomi, politik, dan sosial, budaya dan sebagainya.

Faktor ekonomi, program industri merupakan titik berat pembangunan pada sektor industri yang dilakukan oleh Syah. Seperti konstruksi mobil, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Pembangunan industri itu membutuhkan biaya besar maka Syah menarik modal asing. Untuk itu pemerintah Syah memberikan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan asing yang bersedia menanamkan modalnya di Iran. Akan tetapi keberhasilan sektor industri di satu pihak dan kemunduran sektor pertanian di lain pihak, justru menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, munculnya ketimpangan tingkat pembangunan dan tingkat hidup antara daerah dan pusat, antara kaya dan miskin, hal ini menimbulkan ketidakpuasan golongan kelas menengah, terhadap rezim Syah.²²

140

Juga minyak mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pembangunan sektor industri. Begitu pula dalam meningkatkan penghasilan devisa negara. Dari tahun ke tahun peranan minyak dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan semakin besar. Iran penghasil minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Hasil produksi minyak sebagian besar diekspor ke Eropa Barat, Jepang, Amerika Serikat, Israel, dan Afrika Selatan. Namun yang paling tergantung pada minyak Iran, adalah Israel dan Afrika Selatan. Oleh karenanya negara tersebut yang paling terpukul akibat revolusi Iran, sebab pemerintah Khomeini menghentikan sama sekali ekspor minyak Iran bagi kedua negara tersebut.

Akan tetapi, di samping membawa dampak positif dengan melimpahnya hasil produksi minyak juga menimbulkan eksese-eksese negatif, yang menjadi salah satu faktor meluasnya ketidakpuasan di kalangan rakyat, sebab; *pertama*, meningkatnya hasil produksi minyak tidak

²² M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Iran, Sejak Jatuhnya Syah hingga Wafatnya Khomeini* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 17 - 20.

berhasil meningkatkan daya tampung tenaga kerja. *Kedua*, penghasilan yang didapat dari sektor minyak lebih banyak dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan sektor ekonomi dari pada pertanian, sehingga menimbulkan kepincangan antar sektor pembangunan industri dan pembangunan sektor pertanian, padahal sebagian besar rakyat Iran hidup di sektor pertanian.²³

Pada bulan Januari 1963, pemerintah Syah mengadakan perubahan-perubahan yang kemudian dinamakan “*Revolusi Putih*” yang meliputi enam hal, yakni *pertama*, land reform, *kedua*, nasionalisasi hutan dan padang rumput. *Ketiga*, penjualan umum pabrik-pabrik milik negara untuk membiayai land reform. *Keempat*, pembagian laba antara pemilik dari pekerja dalam pabrik-pabrik industri. *Kelima* reformasi undang-undang pemilihan yang memberikan hak kepada wanita. Dan *keenam*, pembentukan suatu badan pemberantasan buta huruf. Dari keenam program tersebut, land reform mendapat prioritas utama.

Secara garis besar tujuan land reform, adalah *pertama*, batasi pemilihan tanah. Sehingga tanah dalam sebuah desa hanya dimiliki penduduk desa itu. *Kedua*, menyerahkan tanah yang dibebaskan kepada para petani. *Ketiga*, mengorganisir para petani dalam koperasi-koperasi untuk membantu mereka mengerjakan tanah secara efisien. Dalam pelaksanaannya, land reform lebih banyak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani. Nasib mereka tidak banyak berubah dengan adanya land reform. Tanah-tanah yang dibebaskan dari para tuan tanah tidak beralih pada para petani, tapi justru jatuh ke tangan pemerintah. Hal ini menjadi faktor terjadinya demonstrasi besar-besaran di tahun 1963 Khomeini yang menjadi motor penggerak demonstrasi, selanjutnya dipenjara dan diusir dari Iran oleh rezim syah.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 21 – 22. Persoalan “Politik Minyak” ini pula yang mengakibatkan terjadinya konflik (kepentingan ekonomi) seperti kasus Usamah bin Laden yang menguasai “oil pipeline” – salah satunya – di Afghanistan. Dan permasalahan “minyak” masuk ke ranah teologis, lebih jauh lihat A. Maftuh Abagebriel, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia* (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004).

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24

Dalam bidang Hankam, *pertama*, menghadapi kaum saporatis di wilayah Azerbaijan, Baluchistan dan Kurdistan. Oleh beberapa negara Arab, Kurdistan, Khazastan diklaim sebagai wilayah Arab, karena sebagian besar penduduknya keturunan Arab dan lebih sering menggunakan Bahasa Arab. *Kedua*, untuk menghadapi kelompok-kelompok oposisi yang menentang kekuasaan Syah. Jadi secara garis besar angkatan bersenjata Iran mempunyai dua fungsi sekaligus. Sebagai penjaga kedaulatan negara dan sebagai penjaga keamanan bagi kekuasaan Syah.

Juga dalam sosial-budaya, dalam masalah kebudayaan terdapat kontradiksi dalam kebijakan Syah. Di satu pihak, Syah membiarkan Westernisasi berlangsung dengan leluasa. Di lain pihak Syah berusaha membangkitkan kembali unsur-unsur kebudayaan sebelum masuknya agama Islam di Iran. Agama Islam masuk ke Iran pada sekitar tahun 640, dan secara politis Iran berada di bawah kekuasaan raja-raja Islam kurang lebih tahun 750. sejak saat itu pengaruh agama Islam semakin besar di segala bidang. Akan tetapi di bawah kekuasaan Dinasti Pahlevi pengaruh Islam mulai dikurangi. Dengan jalan memasukkan pengaruh kebudayaan barat, serta membangkitkan kembali unsur-unsur kebudayaan pra-Islam. Langkah-langkah yang ditempuh Syah dalam menghidupkan kembali unsur-unsur kebudayaan asli Parsi, disebabkan karena keinginan syah untuk membangkitkan nasioanalisme rakyat Iran. Namun cara-cara tersebut kurang disukai rakyat Iran, terutama para "elit" ulama. Karena mereka menganggap Syah hendak memisahkan Iran dan Islam. Padahal selama ini sebagian besar rakyat Iran merasa bahwa antara Iran dan Islam tidak dapat dipisahkan. Identitas Iran adalah identitas Islam.²⁵

Secara tradisional "elit" ulama (para mullah) mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik di Iran. Sesuai dengan ajaran Syiah yang dianut sebagian besar umat Islam di Iran. Mazhab Syiah secara

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28 – 30. lihat pula John L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 168 – 176.

tegas menganggap bahwa antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan.²⁶ Manifestasi dari ajaran demikian adalah dalam bentuk keterlibatan secara langsung “elit” ulama dalam kehidupan politik.²⁷ Akan tetapi sejak Raja Syah menjadi raja Iran, peranan “elit” agama dalam politik mulai dihapuskan. Kebijakan Reza Syah tersebut kemudian diikuti oleh anaknya, Muhammad Reza Pahlevi dan salah satu “elit” ulama yang berpengaruh dalam revolusi Islam Iran dalam menumbangkan Syah Reza Pahlevi adalah Ayatullah Rulullah Khomeini, seorang yang sangat disegani dan para pemimpin Iran sepeninggalnya adalah mantan murid atau yang mengidolakan sosok kharismatik tersebut.

E. Pemikiran Khomeini dengan Wilayatul Faqihnya

a. Sejarah singkat tentang Khomeini

Sangat menarik untuk mencermati dalam konteks hubungan internasional dan kebijakan luas negeri terjadinya “ketegangan” antara Barat (Amerika Serikat) dengan Iran ketika munculnya revolusi Iran. Salah satu pencetus revolusi tersebut adalah Khomeini sebagai “elit” ulama terkemuka pada saat itu.

Tidak banyak kebijakan luar negeri yang menimbulkan kemarahan dan emosi di Amerika Serikat seperti yang terjadi dalam hubungan AS dengan Iran. Walaupun hubungan As – Iran memburuk sejak 1979, namun di masa pemerintahan Clintonlah keburukan

²⁶ Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang *din wa daulah* (agama dan negara) yaitu: 1. Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara (teokrasi). 2. Islam tidak ada hubungannya dengan negara (sekuler), 3. dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1 – 3. bandingkan pula dengan Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

²⁷ Pasca jatuhnya Syah Iran dan naiknya Khomeini sebagai Presiden sekaligus Wali Faqih menimbulkan “gesekan” dalam tubuh pemerintahan, baik dari kelompok mullah sendiri yang berpaham garis keras di sisi lain dengan kelompok reformis begitu pula dengan tokoh nasionalis yang menghendaki “kekuasaan dan wewenang” ulama dibatasi.

hubungan itu mencapai titik nadir. Tidak seperti beberapa pendahulunya, pemerintahan ini telah memutuskan untuk menantang langsung dan bukannya melunakkan Iran masa pasca revolusi. Sejak 1995, pemerintahan Clinton telah melangsungkan perang ekonomi, politik terhadap rezim Iran yang didominasi oleh “elit” ulama.²⁸

Berlawanan dengan pernyataan-pernyataan umumnya tentang Islam politik yang berwarna akomodasionis, Wacana pemerintahan Clinton mengenai Iran sangatlah tidak bersahabat, seperti juga tindakannya terhadap negeri ini. Dalam konteks Iran, pandangan AS berfungsi sebagai penakar kebijakan. Karenanya Iran merupakan studi kasus ideal jika orang ingin mengamati cara berpikir AS, serta tindakannya terhadap Islam revolusioner, walaupun ada upaya para pembuat kebijakan AS yang mencoba tidak membesarkan faktor Islam di balik perilaku Iran.²⁹ Kalau dirunut ke belakang, munculnya kebijakan Amerika Serikat yang sangat “mengebiri” di negari para mullah tersebut, tidak terlepas dari serangkaian demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh “elit-elit” Iran dalam menjatuhkan Syah Iran yang ditopang oleh kekuatan-kekuatan asing (khususnya Amerika Serikat), hal ini sangat merugikan kepentingan-kepentingan Barat. Gagalnya pemerintahan Syah Iran dan digantikan dengan ideologi “teodemokratis” yang didominasi “elit” ulama dalam merubah “peta perpolitikan” di Iran.

Lalu bagaimana peranan para mullah dalam Revolusi Iran? Bagaimana pula pemikiran yang dikembangkan Khomeini dalam pemerintahan Republik Islam Iran?

Menurut Ramelan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik*, ia menjelaskan ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku seorang aktor politik antara lain:³⁰ *Pertama*, lingkungan sosial tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan

²⁸ Fawaz A. Berges, *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 149.

²⁹ *Ibid*, lihat Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 132 - 133.

media massa. *Kedua*, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. *Keempat*, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Dalam sejarah kontemporer, tiga “lingkaran” yang tidak bisa dipisahkan yaitu: seorang “aktor pemimpin” Ayatullah Khomeini, Iran, dan mazhab Syiah. Artinya, siapapun tidak bisa berbicara tentang Iran (kontemporer) tanpa menyebut nama Ayatullah Khomeini dan Syiah. Begitu pula tidak mungkin berbicara tentang Ayatullah Khomeini tanpa menyebut Iran dan Syiah, dan seterusnya. Iran dan Syiah begitu melekat pada figur Ayatullah Khomeini, setidaknya karena keberhasilan Ayatullah menggerakkan Revolusi Islam Iran yang salah satu dampaknya adalah meluasnya kajian-kajian tentang salah satu mazhab dalam Islam, yang sebelumnya “kurang begitu dikenal”. Dengan kata lain, Ayatullah Khomeinilah yang berjasa “mempopulerkan” mazhab Syiah.³¹

Perhatian terhadap mazhab Syiah, baik di dunia Islam maupun Barat, dalam dekade 1980-an, memang tidak bisa dilepaskan di peristiwa spektakuler yang terjadi di Iran. Peristiwa yang dimaksud adalah, keberhasilan Revolusi Iran yang digerakkan kaum mullah³² atau “elit” ulama Islam mazhab Syiah. Namun, seperti ditulis Seyyed Hossein Nasr, sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk lebih memahami Syiah sebagai tradisi keagamaan dalam Islam. Menurut Nasr, “*The events of*

³¹ M. Riza Sihbudi, *Biografi Politik...*, hlm. 15.
³² Ada 3 kategori mullah yaitu (1) *Hujjah al-Islam* (bukti kebenaran Islam), yang diberikan kepada seorang Mullah yang sudah mencapai kemampuan memahami Islam dengan baik tapi belum mencapai tingkat mujtahid; (2) *Ayatullah* (bukti kebearan Tuhan) yang diberikan kepada seorang mullah yang telah mencapai derajat mujtahid tapi tidak mempunyai para *muqallid* (pengikut) yang terikat dengan hasil ijtihadnya, dan (3) *Ayatullah al-'Uzma* atau Ayatullah Agung yang diberikan kepada seorang mujtahid yang mempunyai para *muqallid* yang terikat dengan hasil ijtihadnya.

the post decade certainly have drawn the attention of the west to twelve –Imam Shi'ism, but they have done little to bring about a greater depth in understanding shi'sim as a religious tradision within Islam".³³

Revolusi Islam di Iran yang berhasil menjungkirbalikkan tatanan sosial, politik ekonomi dan budaya "modern" yang dibangun Dinasti Pahlevi. Sedangkan keluar, revolusi tersebut mengakibatkan perubahan cukup drastis pada peta politik di kawasan Timur Tengah, khususnya kawasan Teluk Parsi, serta menimbulkan dampak cukup "dahsyat"—dalam *religio—politis*—di dunia Islam.

Syiah menjadi sebuah mazhab yang berbeda di garis utama pemikiran Islam. Paham ini muncul dalam pengertian untuk mewakili "oposisi" terhadap keberadaan, yang dipegang oleh aliran utama Sunni. Bagi orang Iran, Syiah merupakan keyakinan politik sekaligus agama.

Latar belakang salah seorang penggerak Revolusi Islam Iran dan yang mempopulerkan ajaran Syiah Itsna Asyariah adalah Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhullah al-Musavi al-Khomeini, atau yang lebih dikenal Ayatullah Khomeini, nama aslinya Ruhollah Mousavi, ia berasal dari Khomeini, kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Arak (Iran bagian tengah). Adapun kota *Ayatullah al-Uzma* di depan namanya menunjukkan bahwa ia seorang ulama terkemuka dalam masyarakat Syiah Dua Belas.

Ia berasal dari keluarga yang sangat religius. Baik ayahnya, Ayatullah Sayyid Mustafa al-Mousavi al-Khomeini, kakeknya, Sayyid Ahmad Hindi, maupun kakek ayahnya, Sayyid bin Ali Syah, dikenal sebagai tokoh-tokoh agama yang disegani pada masanya. Begitu pula kakek dari ibunya (Hajar Agha Khanom), Ayatullah Aga Mirza Ahmad Khawansari. Pada tahun 1903, ayah Ruhullah Khomeini meninggal dunia pada usia 47 tahun. Kabarnya, Sayyid Mustafa dibunuh oleh dua orang bernama Ja'far Quli Khan dan Ridha Quli Sultan dari agen-agen rezim Dinasti Qajar (1796 – 1926). Jenazah Sayyid Mustafa segera di bawa ke Najaf. Para ulama di Teheran, Arak, Isfahan, Golpaygan dan

³³ M. Riza Sihbudi, *Biografi.....*, hlm. 15 – 16.

Khuwaysn mengadakan upacara untuk mengenang kematian (*majlis-e tarhim*) Sayyid Mustafa.³⁴

Sepeninggal sang ayah, Ruhollah Khomeini berada di bawah asuhan ibunya, Hajar A. Khanom, dan bibinya, Sahiba Khanom. Khomeini memulai pendidikannya di *Maktab Khaneh* (sekolah tradisional untuk anak-anak). Pada usia 7 tahun, ia belajar Bahasa Arab di bawah bimbingan saudara sepupunya, Sheilah Ja'far dan seorang guru bernama Mirza Mahmud. Kemudian ia mempelajari *Jami' Muqaddimat* di bawah bimbingan pamannya, Haji Mirza Muhammad Mahdi, dan orang yang berjasa memberikan pengetahuan agama kepadanya adalah kakak kandungnya sendiri Ayatullah Pasandideh.

Pada usia 19 tahun, Khomeini melanjutkan pendidikannya di Pusat Pendidikan Agama atau *Hauzah 'ilmiyah* (istilah bagi pola atau metode pendidikan agama tradisional di lingkungan masyarakat Syiah, baik di Iran maupun di Irak yang masih dipertahankan hingga kini) yang terdapat di kota Arak. Pendidikannya ini berlangsung di bawah bimbingan Ayatullah Syekh Abdul Karim Hairi Yazdi. Seorang ulama terkemuka pada masanya dan yang mempunyai andil besar dalam mengembangkan *Hauzah 'ilmiyah* di kota Qum Iran. Setahun kemudian, bersama dengan gurunya, Khomeini pindah ke *Hauzah 'ilmiyah* di kota Qum. Tidak lama setelah kepindahan Ayatullah ke Qum, terjadi peristiwa penting di Iran. Yaitu, runtuhnya Dinasti Qajar dan tampilnya Dinasti Pahlevi dan rekayasa Inggris (1925). Tampilnya Dinasti Pahlevi diawali oleh naiknya Reza Khan sebagai Syah (raja) Iran yang baru. Sebelumnya, Reza Khan pernah memegang jabatan sebagai komandan angkatan bersenjata (Januari 1920), Menteri peperangan (Februari, 1920), dan Perdana Menteri (1923). Di kota itu, selain mendalami Ilmu Fikih, Khomeini juga mendalami Ilmu Filsafat dan Irfan (asal kata ma'rifah: mengenal Tuhan). Dalam dua bidang terakhir, Khomeini langsung dari Syekh Muhammad Ali Syah Abadi, seorang filsuf yang arif dan terkenal

³⁴ *Ibid.*, hlm. 37 - 38.

dari Iran.³⁵ Tahun 1920 ia juga dibimbing oleh Ayatullah Sheikh Muhammad Golpaygani dan Ayatullah Aga Abbas Araki, tentang hal ini Amir Taheri menulis, *"The Choice of Ayatullah Araki as His Future teacher was to prove a key factor in determining Ruhollah's Future Views on Islam, politics and life in general."*³⁶

Dalam usia yang relatif muda, Khomeini telah mencapai tingkat mujtahid dalam bidang hukum Islam (dalam tradisi Syiah untuk mencapai jenjang tersebut diperlukan persyaratan yang cukup sulit, baik dalam akhlak maupun dalam keluasan pengetahuan). Dengan demikian, ia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang kemudian dianut masyarakat Syiah. Oleh karena itu Ayatullah Burujurji, tokoh utama Syiah pada masanya, wafat pada tahun 1961, Khomeini dipilih masyarakat Syiah di Iran sebagai salah seorang *Marja'dini* (asal kata: raja'a; kembali), maksudnya sebagai tempat kembalinya umat dalam persoalan agama atau pucuk pimpinan spiritual dalam masyarakat Syiah.³⁷

b. Pemikiran Khomeini Tentang Wilayatul Faqih

Dengan pemahaman tentang ilmu pengetahuan rasional dan ilmu pengetahuan tradisional yang mendalam, di usianya yang ke-27 Khomeini mulai mengajar filsafat, dan telah menulis buku-buku tentang berbagai segi agama. Pada usia 30 tahun Ayatullah Khomeini menikah dengan putri seorang ahli agama Islam dan kemudian dikaruniai dua orang putra dan 3 orang putri.

Pada 1943 ia menerbitkan bukunya yang berjudul *Kashf al-Asrar* (Menyingkap Rahasia), di mana ia mengecam pemerintahan Reza Shah, dengan menegaskan bahwa monarki seharusnya dibatasi oleh aturan-aturan dalam syari'at sebagaimana ditafsirkan para mujtahid,

³⁵ Umar Shahab, *Khomeini*, hlm. 111 - 112 dalam Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam Jilid 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

³⁶ Amir Taheri, *The Spirit of Allah: Khomeini and Islamic Revolution*, (London: Hutchinson, 1985), hlm. 40.

³⁷ Umar Sahab, *Khomeini.....*, hlm. 112.

dan mengisyaratkan keutamaan suatu pemerintahan oleh para mujtahid.³⁸ Adapun karyanya yang populer adalah *al-Hukumiyah al-Islamiyyah* (Pemerintahan Islam). Buku itu merupakan kumpulan kuliah Khomeini yang diberikannya mulai 13 Zulkaidah hingga 1 Zulhijjah 1389 di *Hauzah 'Ilmiyah* Najaf (Irak). Dari sini tertuang pandangan Khomeini dalam bidang politik, terutama mengenai ide negara Islam yang berdasarkan prinsip "*Wilayah al-Faqih*" (kepemimpinan kaum ulama).³⁹

Argumen Khomeini adalah keyakinan kuatnya pada perlunya pemerintahan Islam di zaman gaibnya Imam, la pertama kali sekali memandang imam sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yang fungsinya adalah menerapkan hukum-hukum ilahiah dan bukan saja menjelaskannya seperti yang dipahami oleh interpretasi tradisional. Setelah gaibnya imam dua belas itu, semua tanggung jawab dan kekuasaan lain Nabi berpindah ke ulama, dengan pengecualian hak istimewa menerima wahyu Ilahiah; seperti yang diamati oleh Hamid Enayat, kontribusi paling berani Khomeini untuk wacana modern mengenai negara Islam adalah penegasannya bahwa esensi negara seperti itu bukanlah konstitusinya, pada kenyataannya bukan juga komitmen penguasanya untuk mengikuti syari'ah, namun kualitas khusus pemimpinnya. Khomeini beranggapan bahwa kualitas khusus ini hanya dapat dipenuhi oleh *faqih*.⁴⁰

Menurutnya, sepeninggal Nabi SAW, kendatipun tidak ada kesepakatan mengenai identitas pengganti (khalifah)-nya, semua muslim sepakat bahwa, selain memiliki kualifikasi umum seperti kecerdasan dan kemampuan memerintah (kafa'ah) orang tersebut harus memiliki; (1) *faqahah*, yakni berpengetahuan (yaitu mengenai ketentuan dan

³⁸ M Riza Sihbudi, *Biografi Politik...*, hlm. 40.

³⁹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj: M. Anis Maulachela, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002) dalam buku ini Khomeini ingin menegaskan "*Negara Islam*" yang diilhami seperti yang terjadi pada masa Nabi SAW. Ia pun menghendaki agar Islam tidak terkontaminasi oleh segala bentuk pemikiran yang membuatnya menjadi kerdil.

⁴⁰ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara al-farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 124.

aturan Islam) dan (2) 'adalah, bersifat adil, yaitu sangat terpuji iman dan moralnya. Dua kualitas ini, yaitu mengetahui hukum dan bersikap adil, menurut Khomeini, dimiliki oleh *Faqih* zaman sekarang ini yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bersatu, mereka dapat menegakkan pemerintahan semesta yang adil di dunia ini.⁴¹

Jika seseorang yang memiliki kedua kualitas ini ada dan (berhasil) menegakkan pemerintahan, dia menurut Khomeini, akan memiliki otoritas Nabi—meskipun bukan kebajikan dan status Nabi SAW—dan semua orang berkewajiban menaatinya.

Bagi seorang penguasa haruslah lebih mengetahui hukum dibandingkan orang lain, terdapat asumsi implisit bahwa (1) hukum merupakan segalanya bagi negara, dan (2) penguasa tidak hanya mengurus soal-soal politik, tak juga hanya mengurus soal penerapan hukum. Penguasa mengurus segala yang berkenaan dengan hukum, termasuk pengetahuan tentang hukum dan integrasi hakim.

Untuk memahami pemikiran politik Khomeini, lebih jauh haruslah melihat struktur Pemerintah Republik Islam Iran (RII)—sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi RII—yang boleh diasumsikan merupakan perwujudannya. Asumsi ini didasarkan pada beberapa kenyataan. *Pertama*, selain Ayatullah Khomeini sendiri, seluruh ahli yang terlibat dalam penyusunan UUD—apakah ia anggota dewan revolusi, majelis konstituante atau anggota dewan permusyawaratan yang didominasi oleh partai republik Islam sebagian besar adalah murid-murid dan pengikut-pengikut setia Khomeini. *Kedua*, meskipun tidak semuanya, untuk sebagian besarnya UUD RII tentu sejalan dengan keyakinan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi politik dan spiritual.⁴²

Belakangan, diputuskan untuk menggantikan majelis konstituante yang besar itu dengan Dewan Ahli (*Majlis Khubregan*). Para anggota terpilih dewan ini—yang sedikit banyak tetap saja memiliki pandangan yang sejalan dengan Khomeini—melakukan penelaahan seksama dan revisi yang ekstensif atas draf konstitusi. Hampir tidak ada satu pasal

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 125.

⁴² *Ibid.*, hlm. 126.

pun disahkan tanpa melalui pembahasan mendalam, baik mengenai substansi maupun redaksinya. Teks yang mendapat persetujuan akhir dari Dewan Ahli, ketika pekerjaan selesai pada Nopember 1979, sangat berbeda dengan drafnya, baik dalam jumlah pasal, struktur maupun isinya. Menurut Hamid Algar, sebagaimana yang dikutip oleh Yamani, “Perbedaan tunggal yang sangat penting adalah dimasukkannya ke dalam konstitusi itu konsep utama *wilayah al-Faqih* (Pemerintah Faqih). Doktrin ini, seperti yang diuraikan dengan panjang lebar oleh Imam Khomeini pada kuliah-kuliahnya termasyur di Najaf pada 1969, merupakan dasar struktur politik baru, yang menjamin bahwa Republik ini merupakan Republik Islam, baik dalam substansi, fungsi keseharian, maupun penunjukannya.⁴³

Konsep Republik, sebagaimana diterapkan dalam RII, telah dimodifikasi dengan konsep *Wilayah al-Faqih*, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi yang biasa disebut sebagai *Trias Politika*. Hal ini dirasa perlu mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam—wilayah atau imamah—tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep *Trias Politika*, yang didalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam.

Mengenai *Wilayah al-Faqih* pasal 5 konstitusi Iran menyatakan bahwa selama gaibnya shahib al-Zaman—yaitu imam Mahdi—wilayah dan kepemimpinan umat beralih ke *faqih* yang adil dan saleh, yang memahami benar keadaan zamannya, yang berani, cerdas dan mampu memerintah, serta diakui dan diterima sebagai pemimpin oleh mayoritas rakyat. Yang dirujuk oleh pasal konstitusi ini adalah kasus Ayatullah Khomeini yang secara otoritas mengemban jabatan *Wali al-Faqih* tanpa melalui proses seleksi, hukum eleksi (pemilu).⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 128. Bandingkan dengan Ahmed Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Terj. : Ali Syahab (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 114 – 131.

Di luar kasus khusus tersebut, seperti yang dinyatakan oleh pasal 107, ahli-ahli yang dipilih rakyat akan menunjuk salah seorang *faqih* yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin guna mengemban jabatan *Wali Faqih*. Jika tidak ada seseorang yang memenuhi persyaratan, dewan ahli yang sama akan menunjuk tiga atau lima marja' yang memiliki persyaratan yang diperlukan untuk membentuk Dewan *Faqih*. Dewan ahli (*Majlis-i Khubregan*) yang disebut-sebut dalam pasal ini beranggotakan sekitar 72 ahli hukum Islam, yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang khusus dipersiapkan untuk tujuan ini.

Adapun metode pengangkatan dalam sistem *Wilayah al-Faqih* seleksi *wali faqih* oleh umat— dengan kata lain, lewat pemilu langsung —amat kurang dikehendaki dibandingkan diangkatnya *Wali al-Faqih* melalui pengangkatan khusus.

152 Bagaimana konsep *Wilayah al-Faqih* ini memodifikasi sistem republik—dalam hal ini seperti pemilu—yang dianut? Pada hakekatnya RII dirancang untuk menerapkan unsur-unsur asasi sebuah sistem demokratis. Yang terpenting diantaranya RII menerapkan sistem pemilu untuk membentuk tidak kurang dari tiga lembaga tertingginya. *Pertama*, pemilu—seperti yang disinggung diatas—untuk membentuk Dewan Ahli (*Majlis-i Khubregan*). *Kedua*, dalam sistem RII, pemilu juga dilakukan untuk memilih para anggota parlemen, yakni dewan permusyawaratan Islam (*Majlis-i Syura-yi Islami*) sebagai lembaga tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilu berdasarkan sistem distrik. *Ketiga*, pemilu untuk memilih presiden secara langsung. Di luar itu, konstitusi RII juga mewajibkan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat—referendum—dalam penetapan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya yang amat penting.⁴⁵

Dalam suatu sistem yang didalamnya parlemen beranggotakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat, lembaga ini adalah lembaga legislatif tertinggi negara yang tidak bertanggung jawab terhadap siapapun

⁴⁵ Yamani, *Filsafat Politik Islam...*, hlm. 129.

kecuali kepada rakyat. Sementara, menurut penafsiran para pemimpin Revolusi Islam di Iran, sumber legislasi adalah syari'ah. Legislasi ekstra syari'ah, walaupun diterima, harus merupakan turunan atau pengembangan dari syari'ah, atau setidaknya tidak bertentangan dengannya. Di sinilah persoalan, bagaimana cara legislasi syari'ah ini tidak bertentangan dengan syari'ah? Caranya adalah dengan memperkenalkan suatu konsep yang biasa dikenal sebagai *Dewan Wali (The Council of Guardian Ship)*, yang di Iran disebut *Shura-ye Negaliban*. Artinya perundang-undangan yang sudah disetujui oleh parlemen baru menjadi satu hanya dengan persetujuan dewan wali. Dalam sistem politik di RII, setengah anggota dewan ini—yakni enam orang *faqih* dipilih oleh *Wali Faqih*. Setengah anggota yang lain meliputi enam ahli di bidang hukum yang (non keagamaan) yang dipilih oleh parlemen. Penentuan apakah suatu perundang-undangan yang telah disahkan oleh parlemen sesuai dengan peraturan Islam atau tidak, bergantung pada mayoritas *faqih* dalam dewan wali, sementara penentuan apakah perundang-undangan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak, memerlukan suara mayoritas dari semua anggota Dewan Ahli.

153

Persoalannya muncul, kepada siapa presiden bertanggung jawab? Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, presiden lazimnya bertanggung jawab kepada rakyat. Akan tetapi, menurut pemahaman Bapak Revolusi Islam di Iran, di dalam sistem kepemimpinan Islam wewenang parlemen untuk meminta pertanggung jawaban presiden bukan tidak terbatas, pada akhirnya presiden bertanggung jawab kepada imam, atau disebut *wali faqih* (pasal IX, ayat 122). *Wali Faqih*, melalui Dewan Ahli dalam sistem pemerintahan RII, memiliki wewenang untuk mengangkat atau memecat presiden setelah mendapatkan rekomendasi Mahkamah Agung. Kekuasaan *Wali Faqih* dalam hal seperti ini pernah diterapkan Ayatullah Khomeini ketika memecat Abol Hasan Bani Sadr, presiden saat itu.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 130. kuatnya kaum mullah (Khomeini) dalam RII bukan hanya Bani Sadr (Juni 1981) yang tasingkir, PM Bazargan (November 1979) harus rela melepaskan jabatannya. Hal itu bersumber adanya perbedaan konsep tentang

Sistem yang digunakan di Republik Islam Iran, melalui *Wilayah al-Faqih* (Dewan Ahli) merupakan eksperimen dari “teodemokrasi”. Dalam Dewan Ahli mempresentasikan otoritas (*ahl al-amr*, *ahl zikir*, *ulu albab*, *ulama*) sementara pertemuan dan mekanisme pemilu, merupakan representasi musyawarah; memang muncul masalah pada tahun-tahun pertama revolusi. Dalam banyak kasus, RUU yang diajukan oleh parlemen terganjal di Dewan Wali. Akibatnya, banyak RUU yang tidak bisa menjadi UU. Melihat kenyataan seperti ini, Ayatullah Khomeini tidak lantas segera mengeluarkan fatwa yang memihak, tapi membentuk suatu dewan lagi yang disebut *Shura-ye Maslahat* (*The Council of Expediency*), sebuah dewan yang berfungsi sebagai semacam badan pekerja yang anggotanya terdiri dari dewan wali dan anggota parlemen, yang memiliki wewenang akhir dalam hal terjadi perbedaan pendapat diantara kedua lembaga yang disebut.

Namun di dalam tubuh mullah sendiri terjadi konflik pada awal kemenangan revolusi 1978 – 1979,⁴⁷ penyebabnya adalah *Wilayah al-Faqih* (pemerintahan para ulama) memberikan kekuasaan yang tidak terbatas pada Khomeini. Dan di dalam pendukung Khomeini sendiri ada kelompok *garis keras* dan *kelompok reformis* akan tetapi konflik yang terjadi di intern pendukung Khomeini dapat diatasi oleh Khomeini sendiri, namun pasca Khomeini kelompok ini semakin bergejolak di dalam pemerintahan Republik Islam Iran (mullah vs mullah dan mullah vs nasionalis), seperti yang terlihat di dewan ahli, parlemen atau eksekutif (pemilihan presiden).⁴⁸

Di samping itu pula, konflik antara kaum mullah dan kelompok nasionalis non-mullah sebagai konflik elit politik yang memegang tampuk kekuasaan, bersumber pada adanya perbedaan konsepsi tentang

peranan kaum agama dalam kehidupan politik, lihat M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 37.

⁴⁷ Antara pendukung Ayatullah Khomeini yang tergabung dalam Partai Republik Islam (PRI) dan pendukung Ayatullah Shariat-Ma-dari yang tergabung dalam partai Republik Rakyat Islam (PRRI).

⁴⁸ Lebih jauh lihat Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

peranan dan posisi kaum agamawan dalam kehidupan politik. Kaum mullah, khususnya Ayatullah Khomeini, menghendaki peranan aktif agamawan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Sedangkan kelompok nasionalis, seperti Bazargan, Bani Sadr, menghendaki agar para pemuka agama tidak perlu aktif dalam pemerintahan, tetapi cukup sebagai pengawas dan penasehat saja.

F. Penutup

Ideologi yang ditawarkan oleh Ayatullah Khomeini dan pendukung yaitu "teodemokrasi" yang berpendapat adanya hubungan yang erat antara agama dan negara (*din wa daulah*). Dan dalam bentuk sistem pemerintahan mereka menganut Republik Islam Iran. Dan *Wilayah Faqih* (merupakan pemikiran politik Khomeini) melalui dewan ahli merupakan representasi otoritas (*ulu al-amr, ahl dzikir, ulu albab, ulama'*) sementara parlemen dan mekanisme pemilu merupakan representasi musyawarah.

Terlepas sepakat atau tidak sepakat tentang pemikiran "*Wilayatul Faqih*", ala Ayatullah Khomeini, ini merupakan kenyataan dalam mengelola suatu masyarakat dan negara, dan republik Islam Iran memberikan "pelajaran" yang berarti bagi negara lain bahwa tidak ada "negara" manapun yang berhak menentukan nasib negara lain. Keinginan rakyatlah yang menentukan.

BIBLIOGRAFI

- Abegebriel a. Maftuh (ed), *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Lus Publishing, 2004.
- Abidin, Ali Zainal, *Identitas Syiah Mazhab Syiah: Melacak Akar Historis Kelahiran dan Dasar-Dasar Ajarannya*, Jakarta: Ilya, 2004.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Bandung: Mizan, 1996.
- Cipto, Bambang, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Eichelmen, Dale F dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, terj.: Endi Haryono dan Rahmi Yunita, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Esposito John L, *Islam dan Politik*, terj.: Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Esposito John L dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, terj: Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Ensiklopedi Islam jilid 3, 4, 5 dan 7, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Gergas, Fawaz A., *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, Jakarta: Alvabet, 2002.

- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj: M. Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj.: Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Marsh, David dan Gerry Stokes, *Theory and Methods in Political Science*.
- Nashir, Haedar, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tarawang, 2000.
- Prasetyo, Eko, *Inilah Presiden Radikal*, Yogyakarta: Resist Book, 2006.
- Sihbudi, M. Riza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- _____, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Setiawati, Siti Muti'ah (ed), *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika: Dampaknya bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia*, Yogyakarta: PPMTT, INI Fisipol UGM, 2004.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Tohari, Amir, *The Spirit of Allah: Khomeini and The Islamic Revolution*, London: Hutchinson, 1985.
- Vaezi, Ahmed, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, terj.: Ali Syahab, Jakarta: Citra, 2006.

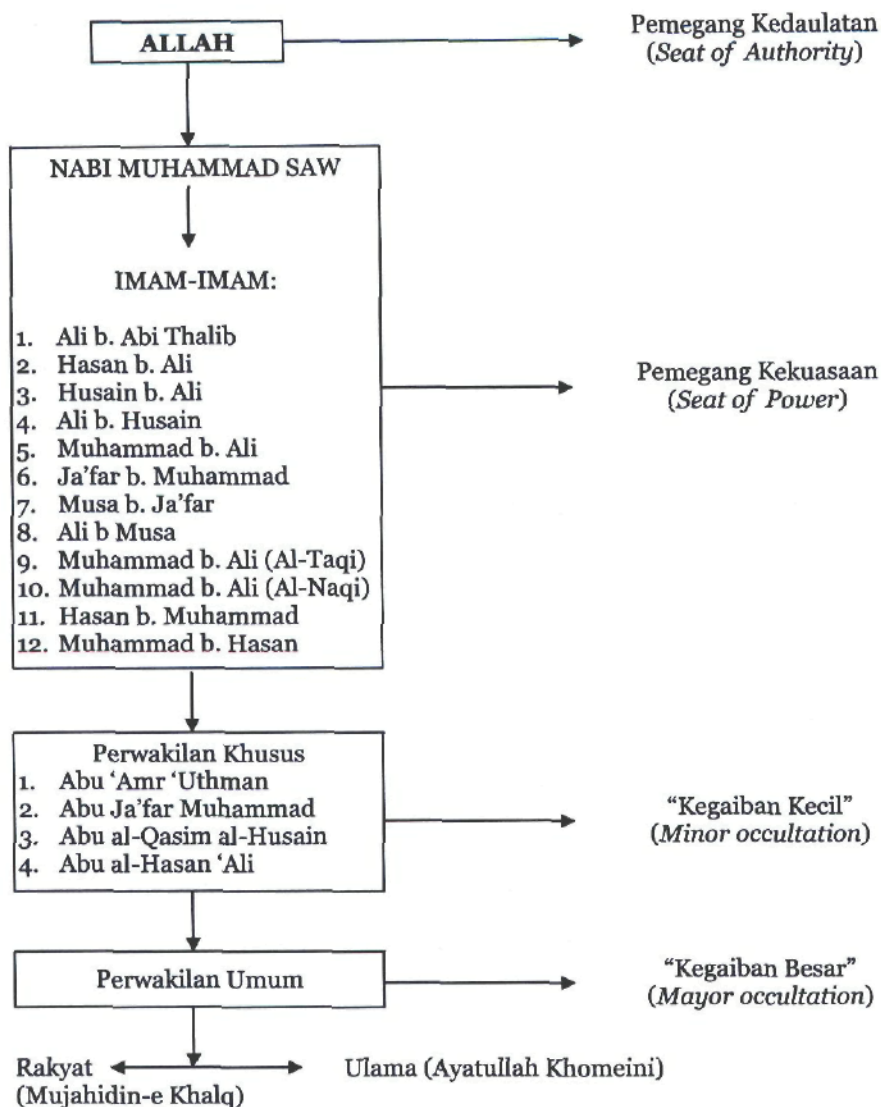
Varma, SP, *Teori Politik Modern*, terj.: Yohanes Kristiarto, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini*, Bandung: Mizan, 2002.

Yin, Robert K, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: Rajawali Press: 2006.□

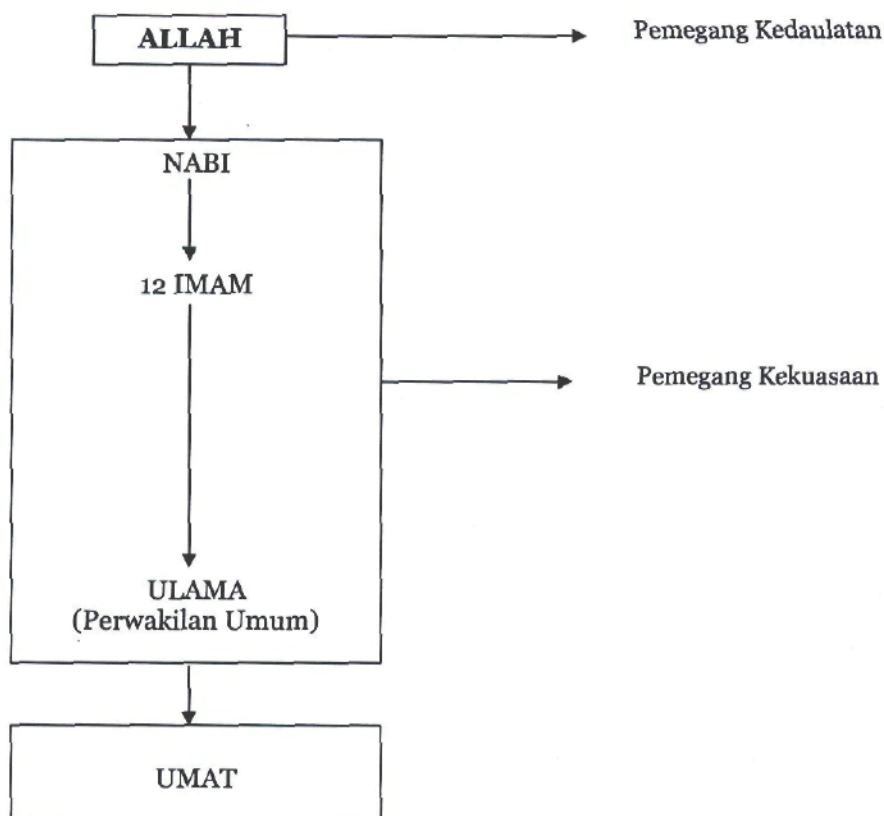
BAGAN 1

Transmisi Kekuasaan Menurut Syiah



Sumber: M. Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, hlm. 145
dikutip dari Mozaffari, *Authority in Islam*, hlm. 38.

BAGAN 2
“Model Kekuasaan” Wilatul Faqih



160

Sumber: M. Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, hlm. 146
dikutip dari Mozaffari, *Authority in Islam*, hlm. 38.